

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Ade Risna Sari. *Perkawinan Campuran: Konsepsi UU no. 1 Tahun 1974*.
Pekalongan: Penerbit NEM, 2022.
- Ahmadi, Zainun. *Hukum Perkawinan Campuran di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1990.
- Ari Purwadi. *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*. Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP) Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2016.
- Dr. Dwi Atmoko, S.H, M.H. dan Ahmad Baihaki, S.H.I, M.H. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Dr. Herlien Budiono, S.H. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di bidang Kenotariatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.
- Dr. Muhaimin, SH., M.Hum. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Dr. Yulia, SH., MH. *Hukum Perdata Internasional*. Aceh: Unimal Press, 2016.
- G.H.S. Lumban Tobing. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1999.
- Habib Adjie. *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- Munir Fuady. *Jaminan Fidusia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- R Soetojo Prawirohamidjojo. *Berbagai Masalah Hukum dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Trisakti, t.t.
- Rachmadi Usman. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ridwan Khairandy. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2013.
- Rizky Ramadhany Wihardjo. *Kedudukan Harta Bersama pada Perkawinan Campuran*. Makassar: NAS Media Pustaka, 2023.

- Salim HS. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
8 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- . *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Saputera, Rio Christiawan; Januar Agung. *Perkembangan dan praktik jaminan fidusia : dilengkapi ulasan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi terkait jaminan fidusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Simanjuntak, P. N. H. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: SITU PUSTAKA, 2025.
- Siti Malikhatun Badriyah. *Buku Ajar Hukum Jaminan*. Semarang: Penerbit Yoga Pratama, 2020.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Subagiyo, Dwi Tatak. *Hukum Jaminan dalam perspektif undang-undangan jaminan fidusia (Suatu pengantar)*. Surabaya: UWKS Press, 2018.
- Sudargo Gautama. *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Bandung: Alumni, 1992.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- . *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Tan Kamello. *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan yang Didambakan*. Bandung: Alumni, 2014.
- Victor Situmorang dan Cormentya Sitanggang. *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekus*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Zainal Asikin. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

B. Jurnal

- Abubakar, Karina Raiza. “Kedudukan Notaris Sebagai Saksi di Persidangan Kaitannya Dengan Hak Ingkar Atas Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Otentik.” *Jurnal Officium Notarium* 4, no. 1 (Desember 2024): 95–110. <https://doi.org/10.20885/jon.vol4.iss1.art7>.

- “Akibat Hukum Untuk Pemegang Hak Tanggungan Atas Vonis Mahkamah Konstitusi Nomor. 69/ PUU-XIII/ 2015 Tentang Perjanjian Pernikahan | Jurnal Analisis Hukum.” Diakses 9 Mei 2026.
<https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/4234>.
- Andayani, Isetyowati. “Kekuatan Surat Bukti Perkawinan Yang Dilangsungkan Di Luar Indonesia Setelah Didaftarkan Di Kantor Catatan Sipil.” *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan* 10, no. 3 (2005): 300–317. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v10i3.274>.
- Ardianta, Irfan, Aris Munandar, dan Djumardin Djumardin. “Analisis Yuridis Hak Ingkar Notaris Terhadap Kerahasiaan Isi Minuta Akta Notaris Berdasarkan Uujnp Dan Kode Etik Notaris.” *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, no. 2 (Desember 2023). <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.150>.
- Ari Purwadi. *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*. Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP) Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2016.
- Armanda, Deby. “Analisis Terhadap Sistem Hukum Dalam Perjanjian Pada Perkawinan Campuran.” *JURNAL MAHASISWA HUKUM* 1, no. 2 (Oktober 2024): 73–79.
- Ayudiatri, Safira, dan Akhmad Budi Cahyono. “The Legality of Grants by Foreign Citizens on Land Objects in Indonesia: Case Studies of Court Decisions.” *SIGn Jurnal Hukum* 4, no. 1 (Mei 2022): 30–45.
<https://doi.org/10.37276/sjh.v4i1.131>.
- CAKRA, ANDREY PUTRA, dan Badriyah Siti Malikhatun. “KEWENANGAN WARGA NEGARA ASING DALAM MELAKUKAN JAMINAN FIDUSIA.” Masters, Fakultas Hukum UNDIP, 2017.
<https://eprints.undip.ac.id/69874/>.
- Chendra, Jane Elizabeth Priscillia, Nurfaidah Said, dan Kahar Lahae. “Kepastian Hukum Dalam Perbuatan Hukum Atas Harta Bersama Pada Pembelian Dan Penjaminan Hak Atas Tanah.” *Jurnal Mimbar Hukum* 32, no. 2 (2020): 308–31. <https://doi.org/10.22146/jmh.50865>.
- Christianto, Daniel. *Permasalahan hukum terkait perjanjian fidusia yang dibuat oleh seseorang berkewarganegaraan asing dan eksekusi objek jaminan fidusia yang berada di luar wilayah Indonesia*. 2017.
<https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/repository.unpar.ac.id/handle/123456789/15293>.
- D, Cinta Rizqareka, Erina Nur Afifa, Rania Syifa Busroni, Raysha Aulia Fazila, Muhamad Dafi Akbar, dan Dwi Aryanti Ramadhani. “A Comparative Study of Marriage Agreements Between Cross-National Couples in

Indonesia and the Netherlands.” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 4, no. 1 (2026): 155–66. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17847469>.

Dani, Muhammad, dan Muhammad Hafidh. “Tanggung Jawab Notaris terhadap Keabsahan Identitas Penghadap dalam Pembuatan Akta Pengakuan Hutang dan Kuasa Jual.” *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik* 5, no. 5 (Juni 2025): 3953–59. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5.4754>.

Eflin Rotua Sinaga S.H. “Pemberi Jaminan Fidusia Berkewarganegaraan Asing | Klinik Hukumonline.” 13 Maret 2015. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemberi-jaminan-fidusia-berkewarganegaraan-asing-lt54b7532a142e7/>.

GABRIELIA FEBRIANTY SHOFIANA, 031724253023. “EKSISTENSI JAMINAN HAK TANGGUNGAN PASCA PEMBENTUKAN PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT SELAMA DALAM IKATAN PERKAWINAN.” Thesis, Universitas Airlangga, 2019. [Http://lib.unair.ac.id](http://lib.unair.ac.id).

“GUGATAN HARTA BERSAMA (TELAAH SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018) | Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam.” Diakses 9 Mei 2026. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/al-syakhsiyyah/article/view/12173>.

“HAK WARGA NEGARA ASING DAN ATAU BADAN HUKUM ASING DALAM KEPEMILIKAN BENDA BERGERAK DI INDONESIA.” Diakses 25 Mei 2026. <https://digilib.ulm.ac.id/archive/digital/detailed.php?code=6628>.

Hardani, S.Pd., M.Si., Nur Hikmatul Auliya, Grad.Cert.Biotech, Helmina ANDriani, M.Si., Roushandy Asri Fardani, S.Si., M.Pd., Jumari Ustiawaty, S.Si., M.Si., Evi Fatmi Utami, M.Farm., Apt., Dhika Juliana Sukmana, S.Si., M.Sc., dan Ria Rahmatul Istiqomah, M.I.Kom. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.

Hartono, Honggo. “Roles of Notary in Drawing Up Marriage Agreement After Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015.” *Prophetic Law Review*, 28 Desember 2020, 180–99. <https://doi.org/10.20885/PLR.vol2.iss2.art4>.

Hermawan, Udi, dan Munsyarif Abdul Chalim. “KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH DALAM MEMBERIKAN PERSETUJUAN TERHADAP PEMANGGILAN NOTARIS OLEH PENEGAK HUKUM.” *JURNAL AKTA* 4, no. 3 (September 2017): 449–54. <https://doi.org/10.30659/akta.v4i3.1820>.

Imigrasi, Direktorat Jenderal. "Imigrasi Kembali Cetak Rekor di 2024, Melaju Cepat dalam Tubuh yang Baru." Direktorat Jenderal Imigrasi, 1 Januari 2020. http://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/2024/12/27/imigrasi-kembali-cetak-rekor-di-2024-melaju-cepat-dalam-tubuh-yang-baru.

Jonatan, Lirianna Nurtanio, dan Gunawan Djajaputra. "Tanggung Jawab Notaris Dan Kepastian Hukum Bagi Kreditur Akibat Lalai Dalam Pendaftaran Fidusia Online." *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 6, no. 7 (Juli 2021): 3315–26. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i7.3561>.

Kamarusdiana, Kamarusdiana. "Disparity In The Judge's Ruling About Community Property Disputes After Divorce (An Analysis of The Verdict In The South Jakarta Religious Court, Religious Court of Jakarta And Supreme Court)." *Jurnal Cita Hukum* 6, no. 1 (Juni 2018): 19–44. <https://doi.org/10.15408/jch.v6i1.8266>.

Karundeng, Janthy Prisilya, Jelly Nasser, dan Felicitas Sri Marniati. "Kepastian Hukum Terhadap Akta Hak Tanggungan Atas Harta Bersama Yang Belum Dibagi Paska Perceraian Tanpa Persetujuan Mantan Suami/Istri." *JOURNAL of LEGAL RESEARCH* 4, no. 4 (September 2022): 1069–88. <https://doi.org/10.15408/jlr.v4i4.28059>.

"KENDALA PELAKSANAAN JUAL BELI PROPERTI BAGI PASANGAN PERKAWINAN CAMPURAN | Widanarti | Masalah-Masalah Hukum." Diakses 9 Mei 2026. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/44571>.

Lakeisha, Hillary. "Comparison of the Legal Consequences of Mixed Marriages with and without a Marriage Agreement." *JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi* 7, no. 4 (Desember 2025). <https://doi.org/10.58258/jihad.v7i4.9676>.

LIDYA ELIZABHET, 030810205 N. "PEMBEBANAN HARTA BERSAMA PERKAWINAN BERUPA HAK MILIK ATAS TANAH SEBAGAI AGUNAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN." Thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2010. <http://lib.unair.ac.id>.

Luciana Nimas Ayuningtyas, Ayuningtyas. "TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM HAL STATUS KEPEMILIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG BUKAN ATAS NAMA DEBITOR (Studi Kasus Pada PT Federal International Finance Cabang Semarang)." Masters, UNDIP, 2014. <https://eprints.undip.ac.id/57270/>.

Martin, Lydyana Trisnaeni, Dimas Herdian Nugrahimsyah, Agung Widya Setya Pratama, Ania Nasyira, dan Nabila Fairuzzahra. "Analisis Kritis Asas Lex Rei Sitae Pada Kasus Perkawinan Warga Negara Indonesia Dan Warga

Negara Asing.” *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 12 (Desember 2024): 420–23. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i12.1149>.

Masnur Syahputra; Bahmid Bahmid; Emiel Salim Siregar. “TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP JAMINAN PIDUSIA.” *JURNAL PIONIR*, no. Vol 5, No 4 (2019): November-Desember (2019). <http://jurnal.una.ac.id/index.php/pionir/article/view/918/818>.

MAULIDIA MULYANI, S. H. “KEMANFAATAN, KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM PUTUSAN MK NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TERHADAP PERJANJIAN KAWIN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN.” Masters, UIN Sunan Kalijaga, 2019. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37675/>.

M.H, Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh, S. H. “WNA Bisa Punya KTP Elektronik, Ini Bedanya dengan Milik WNI | Klinik Hukumonline.” 23 Mei 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/wna-bisa-punya-ktp-elektronik-ini-bedanya-dengan-milik-wni-lt60d2f169d90fc/>.

Mulyati, Dewi. “PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA DALAM PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN WARGA NEGARA ASING.” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 5, no. 2 (Agustus 2017): 263–82. <https://doi.org/10.29303/ius.v5i2.460>.

Nikolaus Budi Arianto Wijaya. “BENDA TAK BERGERAK SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA.” *Justitia Et Pax : Jurnal Ilmu Hukum* (Yogyakarta) 29, no. 02 (Desember 2009): 204–20.

Olivier, Alfarido Moezzad, dan Habib Adjie. “Pelindungan dan Pertanggungjawaban Notaris sebagai Turut Tergugat dalam Sengketa.” *Jurnal Ilmu Multidisplin* 4, no. 2 (Juni 2025): 698–706. <https://doi.org/10.38035/jim.v4i2.931>.

Pratama, Arun. “IMPLEMENTASI PERCAMPURAN HARTA BERSAMA DAN HARTA BAWAAN DALAM PERKAWINAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama NOMOR : 0189/PDT.G/2017/PA.SMG).” *Jurnal Ius Constituendum* 3, no. 1 (April 2018): 15–26. <https://doi.org/10.26623/jic.v3i1.861>.

Prayogo, Yunita, Efi Yulistyowati, dan Agus Saiful Abib. “IMPLIKASI PERJANJIAN PERKAWINAN SEBELUM DAN SESUDAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TERKAIT HARTA BENDA PADA PERKAWINAN CAMPURAN.” *Semarang Law Review (SLR)* 2, no. 2 (2021): 164–75. <https://doi.org/10.26623/slr.v2i2.3858>.

- Prihandini, Yudiana Dewi. "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Atas Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan." *Lex Renaissance* 4, no. 2 (2019): 354–66. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol4.iss2.art9>.
- Prinz, Sulami. "Mixed Marriages without Prenuptial Agreements in Indonesia: Legal Uncertainty and the Quest for Reform." *Jurnal Bedah Hukum* 9, no. 2 (Oktober 2025). <https://doi.org/10.36596/jbh.v9i2.1820>.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan, 69/PUU-XVIII/2015 (Mahkamah Konstitusi 27 Oktober 2015). https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/69_PUU-XIII_2015.pdf.
- Riyanto, Riyanto, Wachid Aryanto, dan Arief Cholil. "Implementation Agreement By Mixed Marriage Based On Act No. 1 of 1974 Concerning Marriage After Constitutional Court Ruling No. 69 / PUU-XIII / 2015 (Study of Notary Role)." *JURNAL AKTA* 5, no. 4 (Desember 2018): 829–36. <https://doi.org/10.30659/akta.v5i4.3712>.
- RIZKI, M. FAJAR, Yunanto Yunanto, dan Bambang Eko Turisno. "AKIBAT HUKUM ATAS PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA WNI DENGAN WNA YANG TIDAK MEMBUAT PERJANJIAN KAWIN (Studi Hak dan Kewenangan Terhadap Harta Kekayaan)." Other, Universitas Diponegoro, 2019. <https://eprints.undip.ac.id/74319/>.
- Sanjaya, Umar Haris. "The Implementation of the Principle of Justice in Post-Nuptial Agreement towards Mixed Marriage: Hope or Challenge?" *Jurnal Hukum Novelty* 12, no. 2 (Oktober 2021): 282–94. <https://doi.org/10.26555/novelty.v12i2.a17856>.
- Sanjaya, Wida Ria. "HAK INGKAR DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JABATAN NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN PIDANA." 2016. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/55072/Hak-ingkar-dan-perlindungan-hukum-terhadap-jabatan-notaris-dalam-proses-peradilan-pidana>.
- Santosa, Lia Wanadriani. "Data perkawinan campuran warga indonesia dan warga asing." Indonesia. *Antara News* (Jakarta), 23 September 2025. <https://jabar.antaranews.com/berita/645688/data-perkawinan-campuran-warga-ndonesia-dan-warga-asing>.
- Satrio, Adi, R. Kartikasari, dan Pupung Faisal. "EKSEKUSI HARTA DEBITOR PAILIT YANG TERDAPAT DI LUAR INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN PEMENUHAN HAK-HAK KREDITOR." *Ganesha Law Review* 2, no. 1 (Mei 2020): 96–108. <https://doi.org/10.23887/glr.v2i1.126>.

Septianingsih, Komang Ayuk, I. Nyoman Putu Budiarta, dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi. "Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata." *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 3 (November 2020): 336–40. <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2584.336-340>.

S.H, Eflin Rotua Sinaga. "Pemberi Jaminan Fidusia Berkewarganegaraan Asing | Klinik Hukumonline." 13 Maret 2015. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemberi-jaminan-fidusia-berkewarganegaraan-asing-lt54b7532a142e7/>.

Srikandi, Dewi Aulia, Yuniar Arini, Dhiya Zalfa 'Atiqoh, Lingga Hanisya, Sheva Dwi Novanto Ramadhan, dan Astika Nurul Hidayah. "PERKAWINAN CAMPURAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM: IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP STATUS KEWARGANEGARAAN, HARTA BERSAMA, DAN HAK WARIS." *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 6 (Juni 2025). <https://law.ojs.co.id/index.php/jhp/article/view/691>.

Sutanto, Christanty Leony, Djumikasih, dan Yenny Eta Widyanti. "Legal Analysis of Foreign Nationals in Fiduciary Guarantees: Between Banking Risks and Legal Vacuum." *NEGREI: Academic Journal of Law and Governance* 5, no. 1 (Mei 2025): 62–78.

Tektona, Rahmadi Indra. "Kedudukan Jaminan Hak Tanggungan Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Mantan Istri Dalam Perbankan : Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 222k/Pdt/2017." *Khazanah Hukum* 2, no. 2 (Agustus 2020): 82–91. <https://doi.org/10.15575/kh.v2i2.8478>.

Tionusa, Tifonia, dan Arsin Lukman. "Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perkawinan Campuran." *Unram Law Review* 7, no. 1 (April 2023). <https://doi.org/10.29303/ulrev.v7i1.256>.

Ula, Umami Lailatul. *Problematika Kedudukan Hukum Harta Bersama Terhadap Perkawinan Campuran Di Indonesia (Studi Perjanjian Perkawinan)*. 6 Juni 2022. <http://repository.uinsi.ac.id/handle/123456789/2243>.

UTOMO, VINCENTCIA GRICEA DHEA, Sri Turatmiyah, dan Murzal Murzal. "ANALISIS PEMBERI JAMINAN FIDUSIA BERKEWARGANEGARAAN ASING DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA." Undergraduate, Sriwijaya University, 2021. <https://repository.unsri.ac.id/55559/>.

Werdiningsih, Dominikus Rato, M. Khoidin, dan Aries Harianto. "Marriage Agreement During Marriage (A Postnuptial Agreement) Principle of Publicity as a Legal Protection for Creditors." *Journal of Law, Policy and Globalization* 101, no. 0 (2020): 129.

Widanarti, Herni. "AKIBAT HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP HARTA PERKAWINAN (PENETAPAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR No: 536/Pdt.P/2015/PN.Dps.)." *Diponegoro Private Law Review* 2, no. 1 (2018).
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/2827>.

Widhasani, Ida Ayu Made, dan Pieter Everhardus Latumeten. "PENGUNAAN HAK INGKAR NOTARIS TERKAIT DENGAN KEWAJIBAN MELAKSANAKAN RAHASIA JABATAN." *JUSTICIA SAINS Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (Maret 2022): 302–19.
<https://doi.org/10.24967/jcs.v6i2.1525>.

Widyaningrum, Indah, Fernando Manullang, dan I. Made Dharsana. "Akibat Hukum Terhadap Akta Jaminan Fidusia Dengan Objek Jaminan Fidusia Bukan Milik Pemberi Fidusia (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 09/PDT/2022/PT BJM)." *Indonesian Notary* 5, no. 2 (Agustus 2024).
<https://doi.org/10.21143/notary.vol5.no2.19>.

Winarno, Jatmiko. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia." *Jurnal Independent* 1, no. 1 (Juni 2013): 44–55.
<https://doi.org/10.30736/ji.v1i1.5>.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015, 27

Oktober 2015.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah dan
Bangunan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.